



Judul : Dewan Pers Ingatkan Tantangan pada Tahun Politik
Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Dewan Pers Ingatkan Tantangan pada Tahun Politik

INSAN pers dan lembaga media saat ini menghadapi dua isu utama tantangan, yakni digitalisasi yang telah mengubah pola lama pers dan isu menjelang tahun politik 2024. Untuk itu, pers harus memperkuat peran.

Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra, kemarin, saat mengunjungi Media Group Network (MGN) di Kedoya, Jakarta Barat, bersama jajaran pimpinan baru Dewan Pers.

“Media kita saat ini di tengah serbuan digitalisasi yang menyebabkan perubahan-perubahan, tidak hanya tingkat nasional, tapi juga lokal. Selain itu, media asing pun hadir hingga platform digital yang merambah pasarannya di kita,” ujar Azyumardi.

Menurut dia, media konvensional tengah terdesak di

era disrupsi teknologi. Banyak media tidak kredibel menyebabkan disinformasi. Platform digital makin marak dan menjadi konsumsi publik tanpa mengikuti regulasi.

Terkait tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024, Dewan Pers ingin MGN dan insan pers nasional memperkuat peran menjaga keutuhan bangsa.

“Era politik bisa menimbulkan kegaduhan, perpecahan di masyarakat. Untuk itu, diksi yang digunakan tidak memecah belah, kita ingin hal itu tidak digunakan di media *mainstream* kita,” tegas Azyumardi.

Ia juga mengingatkan untuk memperbesar peran pers sebagai kekuatan *checks and balances*, mengawasi cabang-cabang kekuasaan.

MGN, khususnya *Media Indonesia*, menurut Direktur

Pemberitaan *Media Indonesia* Gaudensius Suhardi, terus beradaptasi menghadapi disrupsi teknologi, antara lain melalui konvergensi dengan platform lain di MGN. “Pandemi (covid-19) justru menjadi berkah bagi kami. *Work from home* di *Media Indonesia* yang berlanjut dan ini menjadi lebih efektif,” terang Gaudensius.

Gaudensius mendorong Dewan Pers untuk terus melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang (UU) Pers. Menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini ialah pejabat cenderung lebih memilih menjadi narasumber di platform digital seperti *podcast*.

Padahal, amanah UU seharusnya mengutamakan media konvensional yang memiliki izin atau tergabung dalam Dewan Pers. (Van/P-2)